MAKALAH

Hukum Keuangan di Indonesia



**Disusun Oleh:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama  | : | Ropah |
|  |  |  |

**UNIVERSITAS PAMULANG**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan selaku penyusun makalah ini kepada Allah SWT atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas makalah untuk mata kuliah Hukum Keuangan yang yang berjudul *“Hukum Keuangan di Indonesia”* .

Harapannya dengan adanya makalah ini dapat membantu dalam segala faktor maupun yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik, dalam meningkatkan mutu dan kualitas keilmuan peserta didik kedepannya dalam memahami Hukum Keuangan di Indonesia.

Dalam penyusunan makalah ini kami sebagai penyusun dan penulis merasa masih terdapat banyak kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak baik dari dosen pengajar maupun dari teman-teman saya harapkan demi penyempurnaan makalah ini, dan agar dalam pembuatan makalah-makalah selanjutnya dan di waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi.

Serang, 09 Okhtober 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

[MAKALAH 1](#_Toc147766487)

[Hukum Keuangan di Indonesia 1](#_Toc147766488)

[KATA PENGANTAR 2](#_Toc147766489)

[DAFTAR ISI 3](#_Toc147766490)

[BAB I PENDAHULUAN 3](#_Toc147766491)

[A. Latar Belakang 3](#_Toc147766492)

[B. Perumusan Masalah 5](#_Toc147766493)

[C. Tujuan 5](#_Toc147766494)

[BAB II PEMBAHASAN 5](#_Toc147766495)

[A. Pengertian Hukum Keuangan 6](#_Toc147766496)

[B. Macam-macam Hukum Keuangan 7](#_Toc147766497)

[C. Perbedaan Hukum Keuangan Negara dan Hukum Keuangan Publik 9](#_Toc147766498)

[D. Pengaruh perkembangan hukum keuangan di Indonesia terhadap aspek ekonomi 12](#_Toc147766499)

[BAB III KESIMPULAN 14](#_Toc147766500)

# BAB IPENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki sistem keuangan yang berkembang pesat dan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi negara ini. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, peraturan dan regulasi dalam hukum keuangan menjadi semakin penting untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan negara ini. Makalah ini akan menjelajahi berbagai aspek hukum keuangan di Indonesia dan implikasinya terhadap perkembangan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam hukum keuangan selama beberapa dekade terakhir. Reformasi-regulasi perbankan, pasar modal, dan perpajakan telah diadopsi untuk menjawab dinamika ekonomi global dan tuntutan domestik. Salah satu tonggak penting adalah krisis finansial Asia 1997-1998 yang mengguncang ekonomi Indonesia dan mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan signifikan dalam regulasi keuangan.

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah melihat perkembangan positif dalam sektor keuangan, termasuk pertumbuhan pasar modal, peningkatan inklusi keuangan, dan investasi asing yang meningkat. Namun, tantangan juga muncul dalam bentuk masalah perpajakan yang rumit, kepatuhan yang rendah, dan risiko sistemik. Oleh karena itu, memahami kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat dan investor.

Makalah ini akan merinci perkembangan hukum keuangan di Indonesia, menggali bagaimana perubahan regulasi telah memengaruhi berbagai aspek ekonomi, dan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks hukum keuangan Indonesia saat ini. Dengan mengidentifikasi kerangka hukum yang ada dan mengkaji dampaknya, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Indonesia dapat terus berkembang dalam ranah keuangan dan ekonomi.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa itu Hukum Keuangan?
2. Apa saja macam-macam Hukum Keuangan?
3. Apa perbedaan Hukum Keuangan Negara dan Hukum Keuangan Publik?
4. Bagaimana pengaruh perkembangan hukum keuangan di Indonesia terhadap aspek ekonomi ?

## C. Tujuan

1. Pembaca dapat memahami tentang apa itu Hukum Keuangan.
2. Mengetahui macam-macam Hukum Keuangan Negara
3. Mengetahui perkembangan hukum keuangan di Indonesia
4. Mengetahui pengaruh perkembangan hukum keuangan di Indonesia terhadap aspek ekonomi ?

# BAB IIPEMBAHASAN

## Pengertian Hukum Keuangan

 Hukum keuangan adalah bidang hukum yang mengatur aspek-aspek hukum yang terkait dengan sistem keuangan dan keuangan publik. Ini mencakup berbagai aturan dan peraturan yang mengatur kegiatan finansial, baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Hukum keuangan memainkan peran penting dalam mengatur bagaimana keuangan dikelola, transaksi keuangan dilakukan, dan bagaimana hak dan kewajiban keuangan diatur.

 Hukum keuangan merupakan bidang hukum yang kompleks dan berkembang dengan peraturan yang berubah seiring waktu. Berbagai ahli hukum dan ekonomi telah memberikan definisi atau pemahaman tentang makna hukum keuangan. Di bawah ini adalah beberapa definisi atau pemahaman tentang hukum keuangan menurut beberapa ahli:

* Manfred W. Keupp, James Alm, dan Jorge Martinez-Vazquez

 Mereka menyatakan bahwa "hukum keuangan" mencakup seperangkat peraturan yang mengatur penerimaan, pengeluaran, dan manajemen keuangan pemerintah. Ini mencakup peraturan perpajakan, pengelolaan aset, dan mekanisme anggaran.

* Harvey B. Jacobson

 Jacobson mendefinisikan hukum keuangan sebagai "cabang hukum yang membahas regulasi yang mengatur pendanaan pemerintah dan pengeluaran dana, pengumpulan dan penggunaan dana, serta peraturan perpajakan yang relevan."

* Kenneth E. Scott

 Menurut Scott, hukum keuangan adalah "cabang hukum yang membahas cara-cara di mana pemerintah menciptakan dan mengelola pendapatan publik, dengan fokus khusus pada pajak dan pengeluaran publik."

* Lawrence Zelenak

 Zelenak memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hukum keuangan, dengan menyatakan bahwa itu adalah "kumpulan peraturan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan manajemen dana oleh pemerintah, serta cara dana tersebut diberikan kembali kepada masyarakat."

* R. Richard Geddes

 Geddes melihat hukum keuangan sebagai "cabang hukum yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang mengatur pendanaan pemerintah, termasuk pengeluaran, pajak, dan utang publik."

* Sandra F. Johnson

 Johnson mendefinisikan hukum keuangan sebagai "ilmu hukum yang mempelajari pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk pembentukan, pengumpulan, dan pengeluaran pendapatan, serta pembuatan anggaran dan pengelolaan utang."

## B. Macam-macam Hukum Keuangan

 Hukum keuangan adalah bidang hukum yang mengatur aspek-aspek hukum yang terkait dengan sistem keuangan dan keuangan publik. Ini mencakup berbagai aturan dan peraturan yang mengatur kegiatan finansial, baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Hukum keuangan memainkan peran penting dalam mengatur bagaimana keuangan dikelola, transaksi keuangan dilakukan, dan bagaimana hak dan kewajiban keuangan diatur.

Hukum keuangan juga adalah bagian integral dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan suatu negara. Ini juga memainkan peran penting dalam melindungi hak dan kepentingan individu, perusahaan, dan pemerintah dalam konteks keuangan. Berikut adalah beberapa area utama yang masuk dalam cakupan hukum keuangan:

* Peraturan Perbankan Ini mencakup peraturan yang mengatur bank dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini meliputi persyaratan lisensi, pengawasan bank, dan aturan yang mengatur transaksi perbankan.
* Peraturan Pasar Modal Ini mengatur perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Ini juga mencakup regulasi yang mengatur pasar modal, pengungkapan informasi kepada investor, dan perlindungan investor.
* Hukum Perpajakan Ini mengatur peraturan perpajakan, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak properti. Hukum perpajakan juga mencakup masalah pelaporan pajak, kewajiban pembayaran pajak, dan perlindungan hak-hak wajib pajak.
* Hukum Kontrak Keuangan Ini mencakup hukum yang mengatur kontrak keuangan seperti perjanjian pinjaman, kontrak derivatif, dan perjanjian pembiayaan.
* Hukum Kepailitan Ini mengatur proses kepailitan dan reorganisasi hutang, baik untuk perusahaan maupun individu yang mengalami kesulitan keuangan.
* Hukum Investasi Ini mencakup hukum yang berkaitan dengan investasi dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, real estate, dan investasi asing.
* Hukum Perlindungan Konsumen Keuangan Ini melibatkan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi keuangan, seperti produk kartu kredit, pinjaman, dan asuransi.
* Hukum Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT) Ini mencakup regulasi yang dirancang untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam sektor keuangan.
* Hukum Keuangan Publik Ini melibatkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah, termasuk penganggaran, pengeluaran, dan audit.
* Hukum Keuangan Internasional Ini mencakup peraturan yang mengatur transaksi keuangan antar negara, perdagangan mata uang, dan organisasi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

## C. Perbedaan Hukum Keuangan Negara dan Hukum Keuangan Publik

Hukum keuangan negara dan hukum keuangan publik adalah dua bidang hukum yang terkait erat dan sering kali digunakan secara bergantian. Namun, ada perbedaan penting antara keduanya:

1. Hukum Keuangan Negara
2. Fokus

Hukum keuangan negara berfokus pada pengaturan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat (negara) maupun pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota).

1. Sumber Dana

Ini berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, seperti pajak, penerimaan dari sumber daya alam, utang negara, hibah, dan dana lainnya yang digunakan untuk mendanai operasi dan program-program pemerintah.

1. Pengeluaran

Hukum keuangan negara mengatur cara pemerintah menghabiskan dan mengalokasikan dana yang diterima dari berbagai sumber tersebut. Ini termasuk pembentukan anggaran, alokasi dana untuk program-program dan proyek-proyek, serta pengawasan terhadap pengeluaran pemerintah.

1. Tujuan

Tujuan utama hukum keuangan negara adalah memastikan pengelolaan yang efisien dan adil dari dana publik, menjaga stabilitas keuangan negara, serta memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

1. Hukum Keuangan Publik
2. Fokus

Hukum keuangan publik lebih luas dalam cakupannya dan mencakup aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam lingkup yang lebih luas, termasuk pemerintah serta entitas publik dan swasta lainnya.

1. Sumber Dana

Selain mengatur sumber-sumber pendapatan pemerintah, hukum keuangan publik juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran entitas publik dan swasta, seperti perusahaan, organisasi nirlaba, dan individu.

1. Pengeluaran

Ini mencakup pengaturan hukum tentang bagaimana entitas publik dan swasta menghabiskan dan mengelola dana mereka, termasuk investasi, pengeluaran operasional, dan kewajiban utang.

1. Tujuan

Tujuan hukum keuangan publik adalah memastikan bahwa semua entitas, baik pemerintah maupun sektor swasta, menjalankan aktivitas keuangan mereka sesuai dengan hukum, etika, dan prinsip-prinsip keuangan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 butir 1).  Hukum ini adalah beberapa hukum tertulis yang terkumpul untuk mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki negara dalam bidang keuangan baik berbentuk uang maupun barang yang terkait dalam kegiatan negara dan publik. Landasan hukum ini terletak di pembukaan UUD 1945 untuk mencapai tujuan negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara yang menjadi sorotan utama hukum keuangan negara ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban. Dalam kata lain keuangan negara berkaitan dengan APBN, APBD, aset dan keuangan negara di Perjan, Perum, PN-PN dan beberapa perusahaan yang lain. Pengertian ini mengacu pada UU Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkup ini dikukuhkan dengan pasal 2g UU Keuangan Negara. Pasal ini mengatur hak dan kewajiban negara.

Sedangkan Keuangan publik merupakan aktifitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik yang dikendalikan dan didanai pemerintah. Fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.8 Keuangan publik hakikatnya menunjuk pada dua hal yaitu sektor keuangan yang digunakan untuk kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam lingkungan kuasanya. Atau keuangan yang ditunjukkan pada fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan umum dan pelayanan publik. Bagi negara berkembang, keberadaan keuangan publik sama halnya dengan administrasi publik merupakan keharusan sebagaimana dikemukakan Irving Swerdlow yang mengemukakan, “the importance of adequate publik administrastion for economic growth was quickly recognized and emphasized.

Dengan demikian, hukum keuangan negara adalah subbagian dari hukum keuangan publik yang lebih luas. Hukum keuangan negara secara khusus fokus pada pengaturan keuangan pemerintah dan pengelolaan dana publik, sementara hukum keuangan publik mencakup seluruh spektrum masalah keuangan dalam masyarakat yang melibatkan berbagai entitas dan sektor.

## D. Pengaruh perkembangan hukum keuangan di Indonesia terhadap aspek ekonomi

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan memegang peranan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu jalur akumulasi modal (modal fisik dan modal manusia) dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan mempengaruhi kedua sumber pertumbuhan dengan cara mempengaruhi tingkat tabungan (sisi penawaran dana) dan dengan merealokasikan tabungan ke dalam berbagai alternatif investasi (sisi permintaan dana), baik investasi modal fisik, investasi sumber daya manusia, maupun investasi teknologi. Semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya maka akan semakin besar pula kontribusi sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanpa akses pada berbagai sumber dana (investor), banyak kegiatan usaha yang hanya mampu berproduksi dalam volume relatif kecil sehingga tidak efisien. Berdasarkan

Perkembangan hukum keuangan di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aspek ekonomi negara tersebut. Hukum keuangan mencakup berbagai peraturan dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan publik, perbankan, pasar modal, perpajakan, dan sejumlah aspek lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Berikut adalah beberapa pengaruh penting dari perkembangan hukum keuangan di Indonesia terhadap aspek ekonomi:

1. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Hukum keuangan yang kondusif dapat memberikan keyakinan kepada investor baik domestik maupun asing. Hal ini dapat mendorong peningkatan investasi dalam berbagai sektor ekonomi, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Stabilitas Keuangan: Regulasi yang kuat dan efektif dalam hukum keuangan dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yang dapat mencegah terjadinya krisis keuangan yang merusak.
3. Pajak dan Pendapatan Negara: Hukum keuangan juga mencakup peraturan perpajakan. Peraturan ini dapat memengaruhi pendapatan negara melalui pengumpulan pajak yang adil dan efisien. Peningkatan dalam pengumpulan pajak dapat memberikan sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan pelayanan publik.
4. Perbankan dan Keuangan Inklusif: Hukum keuangan yang baik dapat memfasilitasi perkembangan sektor perbankan dan keuangan yang inklusif. Ini berarti lebih banyak orang dapat mengakses layanan perbankan, kredit, dan investasi, yang dapat meningkatkan daya beli dan akses terhadap modal untuk usaha kecil dan menengah.
5. Perlindungan Konsumen: Hukum keuangan yang baik juga melibatkan perlindungan konsumen dalam berbagai transaksi keuangan. Ini membantu menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah praktik-praktik yang merugikan mereka.
6. Pembangunan Infrastruktur: Hukum keuangan yang efisien dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
7. Kepatuhan Internasional: Indonesia juga perlu mematuhi standar internasional dalam hukum keuangan, terutama dalam hal transparansi keuangan dan pencegahan pencucian uang. Kepatuhan terhadap standar internasional ini dapat memfasilitasi akses ke pasar global dan investasi asing.

# BAB IIIKESIMPULAN

Hukum keuangan negara adalah seperangkat peraturan dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan publik, perpajakan, perbankan, pasar modal, dan berbagai aspek keuangan lainnya dalam suatu negara. Tujuan utama dari hukum keuangan negara adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemerintah mengelola keuangan publik dengan efisien, adil, dan transparan. Kesimpulan utama mengenai hukum keuangan negara adalah:

Dengan memiliki hukum keuangan yang kuat dan efektif, sebuah negara dapat mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosialnya dengan lebih baik, memastikan penggunaan dana publik yang efisien, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Dalam rangka memaksimalkan pengaruh positif hukum keuangan terhadap aspek ekonomi, penting bagi pemerintah untuk terus memperbarui dan meningkatkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan ekonomi yang dihadapi. Selain itu, pelaksanaan dan penegakan hukum keuangan yang efektif juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan dampaknya terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.